

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sikap

1. Sikap

a. Definisi Sikap

Ada banyak sekali definisi tentang sikap, dalam bab ini penulis akan mengemukakan definisi sikap menurut beberapa ahli, yaitu;

Secord dan Backman (Azwar, 2013: 5) mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek lingkungan sekitarnya.

Menurut Petty dan Cacioppo (Azwar, 2013: 6) sikap merupakan evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu-isu. Sedangkan menurut Mar'at dalam (Ahmadi, 1999: 161) sikap merupakan kesiapan bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap objek tersebut.

Menurut Robbins (Ardana, dkk., 2009: 21) sikap adalah Pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa.

Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Misalnya “Saya menyenangi pekerjaan saya”. Menurut Sudjono (1995:4) definisi sikap adalah :

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi baru merupakan kecenderungan atau pre-disposisi. Sikap mengandung tiga komponen yaitu kognisi, afeksi dan konasi. Konasi berkenaan dengan ide dan konsep, afeksi menyangkut dengan kehidupan emosional, sedangkan konasi merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Berdasarkan pengertian sikap yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sikap adalah suatu kecenderungan individu untuk memberikan respons atau tanggapan yang berupa kesiapan dari perwujudan perasaan individu terhadap objek tertentu. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana sikap politik elite Partai Golkar di DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung terhadap konflik yang terjadi pada tubuh partai beringin itu.

b. Teori Organisasi Sikap

1) Teori Keseimbangan Heider

Teori Keseimbangan (*Balance Theory*) yang dikemukakan oleh Fritz Heider merupakan formulasi yang paling awal dan sederhana dari prinsip konsistensi yang dianut dalam teori organisasi sikap. Keadaan keseimbangan atau ketidakseimbangan selalu melibatkan tiga unsur yaitu individu (I), orang lain (O) dan objek sikap (Ob). Pengertian keadaan seimbang atau adanya keseimbangan menunjuk kepada suatu

situasi dimana hubungan diantara unsur-unsur yang ada berjalan harmonis sehingga tidak terdapat tekanan untuk mengubah keadaan.

Dengan memberi tanda '+' untuk afek positif dan tanda '-' untuk afek negatif, maka suatu keseimbangan akan tercapai bila hubungan diantara ketiga unsur tersebut ditunjukkan oleh tanda ++ atau ditunjukkan oleh tanda – yaitu bila ketiga-tiganya positif atau dua diantara ketiganya adalah negatif. Dengan demikian, prinsip keseimbangan Heider dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Diantara dua unsur, suatu keadaan seimbang akan terjadi apabila hubungan diantara keduanya adalah positif atau negatif dari semua segi, yaitu sesuai dengan semua arti L dan U.....Diantara tiga unsur, suatu keadaan seimbang akan terjadi apabila ketiga hubungan semuanya positif dari semua segi atau bila dua diantaranya negatif dan satu positif”

Teori keseimbangan Heider menurut para ahli psikologi sosial memang merupakan awal yang baik dalam melakukan analisis mengenai konsistensi kognitif dan implikasinya sangat luas walaupun memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu antara lain, pertama dalam sifat hubungan unsur-unsur yang hanya kualitatif (suka-tidak suka) padahal sikap dan kepercayaan memiliki derajat atau tingkatan yang perlu dikuantifikasikan. Kedua, teori ini berbicara mengenai hubungan antar unsur-unsur yang banyaknya hanya terbatas pada tiga unsur saja. Ketiga, walaupun Heider mendiskusikan kemungkinan adanya hubungan ganda diantara dua unsur tapi ia tidak bicara mengenai

tingkat keseimbangan yang dapat terjadi dalam konfigurasi yang kompleks seperti itu (Azwar, 2013: 42)

2) Teori Disonansi Kognitif Festinger

Ada kecenderungan pada manusia untuk tidak mengambil sikap-sikap yang bertentangan satu sama lain dan kecenderungan untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan sikapnya. Namun, menurut Festinger, asumsi bahwa manusia selalu logis dan termotivasi untuk menjaga konsistensi kognitif itu ternyata harus berhadapan dengan kenyataan bahwa perilaku manusia seringkali irrasional. Motif yang terlalu kuat untuk mempertahankan konsistensi kognitif dapat menimbulkan perilaku yang irasional bahkan menyimpang. Rumusan teori disonansi kognitif terlebih terpusat pada apa yang akan terjadi bila terdapat ketidaksesuaian antara sikap atau antara sikap dan kenyataan.

Untuk menjelaskan teorinya ini, Festinger mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan unsur kognitif adalah setiap pengetahuan, opini, atau apa yang dipercayai orang mengenai lingkungan, mengenai diri sendiri atau mengenai perilakunya. Sewaktu terjadi konflik diantara kognisi-kognisi, terjadilah disonansi. Disonansi kognitif sendiri mempunyai arti keadaan psikologis yang tidak menyenangkan yang timbul ketika dalam diri manusia terjadi konflik antara dua kognisi. Disonansi kognitif hanya dapat terjadi pada unsur-unsur

kognitif yang relevan atau yang ada hubungannya satu sama lain. Festinger mengemukakan hipotesis dasar dalam teori ini yaitu:

“Adanya disonansi, yang menimbulkan ketidakenakan psikologis, akan memotivasi seseorang untuk mencoba mengurangi disonansi tersebut dan mencapai konsonansi..... Kekuatan tekanan untuk mengurangi disonansi itu merupakan fungsi besarnya disonansi yang dirasakan.”

Untuk mengurangi disonansi ini biasanya berupa perubahan salah satu atau kedua unsur kognitif yang terlibat atau berupa penambahan unsur kognitif ketiga sedemikian rupa sehingga konsonansi tercapai kembali. 3 cara pengurangan disonansi adalah mengubah unsur kognitif yang berupa perilaku; mengubah unsur kognitif dari lingkungan; dan menambahkan unsur kognitif yang baru (Azwar, 2013:45).

3) Teori Konsistensi Afektif-Kognitif Rosenberg

Rosenberg memandang pengertian komponen kognitif sikap tidak saja sebagai apa yang diketahui mengenai objek sikap akan tetapi mencakup pula apa yang dipercayai mengenai hubungan antara objek sikap itu sendiri dengan nilai-nilai penting lainnya dalam diri individu. Dengan pandangannya, Rosenberg telah mengemukakan secara lebih spesifik bagaimana organisasi antar komponen afektif dan komponen kognitif sikap.

Pusat perhatian utama Rosenberg dengan teorinya ini adalah konsepnya mengenai apa yang terjadi dalam individu sewaktu terjadi perubahan sikap. Hipotesis utamanya adalah bahwa hakikat dan kekuatan perasaan terhadap suatu objek sikap berkorelasi dengan pengertian mengenai objek tersebut. Dikatakannya bahwa afek positif yang kuat dan stabil terhadap suatu objek tentu berkaitan dengan keyakinan bahwa afek positif itu akan membawa kepada tercapainya sejumlah nilai yang penting sedangkan afek yang negatif tentu berkaitan dengan keyakinan bahwa afek negatif itu akan menjadi hambatan dalam mencapai sejumlah nilai-nilai yang penting pula.

Tampaklah bahwa Rosenberg lebih menekankan pada pentingnya usaha mempengaruhi komponen afektif agar komponen kognitif berubah daripada sebaliknya, sedangkan para teorisi lain biasanya lebih menekankan pada cara mempengaruhi komponen kognitif guna mengubah komponen afektif (Azwar, 2013:51).

4) Teori Fungsional Katz

Teori ini mengatakan bahwa untuk memahami bagaimana sikap menerima dan menolak perubahan haruslah berangkat dari dasar motivasional sikap itu sendiri. Apa yang dimaksudkan oleh Katz sebagai dasar motivasional merupakan fungsi sikap bagi individu yang bersangkutan. Fungsi sikap bagi manusia telah dirumuskan menjadi 4 macam, yaitu:

- Fungsi Instrumental, Fungsi Penyesuaian atau Fungsi Manfaat

Fungsi ini menyatakan bahwa individu dengan sikapnya berusaha untuk memaksimalkan hal-hal yang diinginkan dan meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, individu akan membentuk sikap positif terhadap hal-hal yang dirasakannya akan mendatangkan keuntungan dan membentuk sikap negatif terhadap hal-hal yang dirasanya dapat merugikan dirinya. Dalam pergaulan sosial, sikap yang sesuai akan memungkinkan seseorang untuk memperoleh persetujuan sosial dari orang-orang disekitarnya.

- Fungsi Pertahanan Ego

Sewaktu individu mengalami hal yang tidak menyenangkan dan dirasa akan mengancam egonya atau sewaktu ia mengetahui fakta dan kebenaran yang tidak menyenangkan bagi dirinya, maka sikapnya dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego yang akan melindunginya dari kepahitan kenyataan tersebut. sikap dalam hal ini merefleksikan problem kepribadian yang tidak terselesaikan (Azwar, 2013:53).

- Fungsi Pernyataan Nilai

Nilai adalah konsep dasar mengenai apa yang dipandang sebagai baik dan diinginkan. Nilai-nilai terminal merupakan preferensi mengenai keadaan akhir tertentu seperti persamaan, kemerdekaan, hak asasi dll. Nilai instrumental merupakan preferensi atau pilihan mengenai

berbagai perilaku dan sifat pribadi seperti kejujuran, keberanian, atau kepatuhan akan aturan.

- Fungsi Pengetahuan

Menurut fungsi ini, manusia mempunyai dorongan dasar untuk ingin tahu, untuk mencari penalaran, dan untuk mengorganisasikan pengalamannya. Adanya unsur-unsur pengalaman yang semula tidak konsisten dengan apa yang diketahui oleh individu akan disusun, ditata kembali kembali atau diubah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu konsistensi. Jadi, sikap berfungsi sebagai suatu skema, yaitu suatu cara strukturisasi agar dunia disekitar tampak logis dan masuk akal. Sikap digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap fenomena luar yang ada dan mengorganisasikannya.

Selanjutnya, Katz dan Stotland mengatakan bahwa prinsip konsistensi dalam teori ini terutama berlaku bagi objek sikap tunggal. Komponen-komponen kognitif, afektif dan perilaku dalam objek sikap tunggal bergerak menuju suatu konsistensi namun dalam suatu sistem secara keseluruhan berbagai sikap yang berbeda dapat saja tidak konsisten satu sama lain tanpa menimbulkan ketegangan.

5) Teori Kepentingan Ekonomi

Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya yang ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat. Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk Berdasarkan sejarah, titik balik perkembangan gagasan-gagasan hubungan politik dengan ekonomi jelas-jelas terjadi di abad kedelapan belas. Sebelumnya yang diterima adalah pembagian fungsional: disepakati bahwa ekonomi dan politik merujuk pada arena-arena kegiatan yang berbeda. Ekonomi adalah cara-cara untuk mewujudkan sasaran-sasaran moral spesifik atau (dalam periode Merkantilisme abad keenam belas dan ketujuh belas) cara-cara untuk melestarikan dan meningkatkan kekuasaan politik (dari negara dan penguasa). Zaman Yunani Kuno (atau setidaknya dalam karya Aristoteles, *Politics*), ekonomi merupakan bagian dari studi politik yang pada gilirannya menjadi bagian dari penelaahan etika dan filosofi. Awalnya ekonomi dianggap sebagai seni manajemen domestik, dimana lewat perluasannya berkembanglah makna paling awal ekonomi politik, merujuk pada seni mengelola ekonomi sebuah negara (Staniland, 2003:16).

6) Teori Kekuasaan

Harold D. Laswell (1984 : 9) berpendapat bahwa kekuasaan secara umum berarti "kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir

menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan''. Sejalan dengan itu, dinyatakan Robert A. Dahl (1978 : 29) bahwa ''kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan untuk memengaruhi dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu pihak kepada pihak lain''.

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya. Bagian penting dari pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan, yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang memengaruhi ''(Mochtar Mas' oed dan Nasikun, 1987 : 22). ''Kekuasaan merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk memengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang memengaruhi.

Dalam pengertian yang lebih sempit, kekuasaan dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya dan masyarakat pada umumnya'' (Ramlan Surbakti, 1992 : 58) ''Kekuasaan merupakan penggunaan sejumlah besar sumber daya (aset, kemampuan) untuk

mendapat kepatuhan dan tingkah laku menyesuaikan dari orang lain'' (Charles F. Andrain, 1992 : 130). Kekuasaan pada dasarnya dianggap sebagai suatu hubungan, karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa jadi seseorang individu atau sekelompok orang, demikian juga obyek kekuasaan bisa satu atau lebih dari satu.

Menurut Walter S. Jones (1993 : 3) kekuasaan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Kekuasaan adalah alat aktor-aktor internasional untuk berhubungan satu dengan lainnya. Itu berarti kepemilikan, atau lebih tepat koleksi kepemilikan untuk menciptakan suatu kepemimpinan;
- b. Kekuasaan bukanlah atribut politik alamiah melainkan produk sumber daya material (berwujud) dan tingkah laku (yang tidak berwujud) yang masing-masing menduduki posisi khusus dalam keseluruhan kekuasaan seluruh aktor;
- c. Kekuasaan adalah salah satu sarana untuk menancapkan pengaruh atas aktor-aktor lainnya yang bersaing menggapai hasil yang paling sesuai dengan tujuan masing-masing;
- d. Penggunaan kekuasaan secara rasional merupakan upaya untuk membentuk hasil dari peristiwa internasional untuk dapat mempertahankan atau menyempurnakan kepuasan aktor dalam lingkungan politik internasional.

Menurut Benedict Anderson (1972 : 48) kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsep pemikiran barat dan konsep pemikiran Jawa. Menurutnya kekuasaan dalam konsep pemikiran Barat adalah abstrak, bersifat homogen, tidak ada batasnya, dan dapat dipersoalkan keabsahannya. Sedangkan kekuasaan menurut konsep Jawa adalah konkrit, bersifat homogen, jumlahnya terbatas atau tetap dan tidak mempersoalkan keabsahan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan sangat penting kedudukannya dalam masyarakat, dengan kekuasaan suatu kelompok dapat melakukan apa saja yang diinginkan dan dapat memengaruhi perbuatan-perbuatan kelompok lain agar taat dan patuh terhadap pemegang kekuasaan (<https://donipengalaman9.wordpress.com/2012/11/16/teori-kekuasaan/>, diakses pada 20 Oktober 2015, pukul 21.34WIB).

c. Ciri-ciri Sikap

Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, dapat dikatakan bahwa sikap merupakan faktor internal, tetapi tidak semua faktor internal adalah sikap. Adapun ciri-ciri sikap menurut Gerungan (2004: 151) yaitu:

- 1) Sikap bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan, melainkan dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya.
- 2) Sikap itu dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang, atau sebaliknya, sikap itu dapat dipelajari karena itu sikap dapat berubah-ubah pada orang-orang bila terdapat keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap orang itu.

- 3) Sikap itu berdiri sendiri, akan tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, dipelajari atau berubah.
- 4) Objek sikap dapat merupakan suatu hal tertentu, akan tetapi dapat merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
- 5) Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan.

Berdasarkan ciri-ciri sikap yang dikemukakan di atas, maka ciri-ciri sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap dapat terbentuk dan berubah sesuai dengan hal-hal yang mempengaruhinya, dalam sikap mengandung segi motivasi dan perasaan.

d. Fungsi Sikap

Menurut Ahmadi (1999:179) bahwa fungsi sikap dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu :

Pertama, sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Bahwa sikap adalah sesuatu yang bersifat *communicable*, artinya sesuatu yang mudah menular, sehingga mudah pula dimiliki bersama. Justru karena itu suatu golongan yang mendasarkan atas kepentingan bersama dan biasanya ditandai oleh adanya sikap anggotanya yang sama terhadap suatu objek.

Kedua, sikap berfungsi sebagai alat pengukur tingkah laku, bahwa tingkah laku timbul karena hasil pertimbangan-pertimbangan perangsang-perangsang yang tidak reaksi secara spontan, akan tetapi mendapat proses yang secara sadar untuk menilai perangsang-perangsang tersebut. Jadi diantara perangsang dan reaksi disisipkannya sesuatu yang berwujud pertimbangan-pertimbangan terhadap perangsang itu sebenarnya.

Ketiga, sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa manusia dalam menerima pengalaman-pengalaman dari luar yang sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif, artinya semua pengalaman yang berasal dari luar tidak sepenuhnya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana-mana yang perlu dan tidak perlu dilayani. Jadi semua pengalaman ini diberi penilaian, lalu dipilih.

Keempat, sikap politik berfungsi sebagai pernyataan pribadi. Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang. Ini sebabnya bahwa sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Oleh karena itu dengan melihat sikap-sikap pada objek-objek tertentu, sedikit banyak

orang dapat mengetahui pribadi orang tersebut. Jadi disimpulkan bahwa sikap merupakan pernyataan pribadi.

Berdasarkan fungsi sikap yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi sikap yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai tolak ukur tingkah laku yang timbul karena hasil pertimbangan dari perangsang yang tidak bereaksi secara spontan.

e. Komponen-komponen Sikap

Dilihat dari strukturnya, sikap terdiri atas tiga komponen. Menurut Brecler, Katz dan Rajewski (Azwar, 2013: 6), ketiga komponen sikap terdiri dari :

- 1) Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Sering kali komponen kognitif ini dapat disamakan dengan pandangan (opini), terutama apabila menyangkut isu atau problem yang kontroversial.
- 2) Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional ini lah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan merubah sikap seseorang.
- 3) Komponen perilaku berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap suatu dengan cara-cara tertentu.

Menurut Azwar (2013: 20) disebutkan bahwa terdapat tiga respons mengenai sikap, yaitu: kognitif, Afektif, dan Konatif. Ketiga respons mengenai sikap tersebut dapat dilihat melalui dua tipe *responsive* yaitu Verbal dan Nonverbal. Untuk melihat kategori respons mengenai sikap, dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Respons Mengenai Sikap

Tipe Respons	Kategori Respons		
	Kognitif	Afektif	Konatif
Verbal	Pernyataan keyakinan mengenai objek sikap	Pernyataan perasaan terhadap objek sikap	Pernyataan intensi perilaku
Nonverbal	Reaksi perseptual terhadap objek sikap	Reaksi fisiologis terhadap objek sikap	Perilaku tampak sehubungan dengan objek sikap

Sumber : Azwar (2013 : 20)

Respons kognitif verbal merupakan pernyataan mengenai apa yang dipercayai atau diyakini mengenai objek sikap. Respons kognitif yang nonverbal lebih sulit diungkap karena informasi tentang sikap yang diberikan lebih bersifat tidak langsung.

Respons afektif verbal dapat dilihat pada pernyataan verbal perasaan seseorang mengenai sesuatu. Respons afektif nonverbal berupa reaksi fisik seperti ekspresi muka yang mencibir, tersenyum, gerakan lengan dan sebagainya dapat menjadi indikasi perasaan seseorang apabila dihadapkan pada objek sikap.

Respons konatif pada dasarnya merupakan kecenderungan berbuat. Dalam bentuk verbal, intensi ini dapat terungkap lewat pernyataan keinginan

melakukan atau kecenderungan untuk melakukan. Sedangkan respons konatif nonverbal dapat berupa ajakan pada orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap dalam penelitian ini yaitu kesiapan untuk memberikan sikap atau respons terhadap objek yang dihadapinya. Sikap tersebut merupakan suatu hal untuk mendukung atau tidak mendukung terhadap objek tersebut, dalam hal ini adalah sikap anggota Partai Golkar terhadap konflik internal Partai Golkar.

Aspek tersebut terdiri dari aspek kognitif yang berkaitan dengan pandangan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai suatu hal yang dalam penelitian ini yaitu terhadap konflik internal Partai Golkar. Aspek afektif yaitu pada dasarnya merupakan kecenderungan untuk berbuat. Dalam bentuk verbal, intensi ini terungkap lewat pernyataan keinginan melakukan atau kecenderungan untuk melakukan. Dalam penelitian ini, bentuk pernyataan konatif dapat berupa keinginan untuk ikut serta dalam proses penyelesaian konflik internal Partai Golkar.

Aspek konatif yaitu aspek yang berkaitan dengan perilaku dengan kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap suatu hal dengan cara-cara tertentu dengan menanggapi dan menyikapi konflik yang terjadi pada internal Partai Golkar di pusat yang berimbas pada kepengurusan di daerah.

2. Tinjauan Tentang Politik

- 1) Menurut David Easton yang dikutip oleh Philipus (2004: 90) politik merupakan semua aktifitas yang mempengaruhi kebijaksanaan itu dilakukan.
- 2) Menurut Joyce Mitchel yang dikutip oleh Philipus (2004: 92) politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.
- 3) Menurut Maran yang dikutip oleh Susilo (2003:4) politik merupakan studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan masalah lain. Dengan kata lain, politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan.

Dari berbagai definisi politik di atas, dapat disimpulkan bahwa politik sebagai aktifitas yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijaksanaan demi kepentingan bersama. Menurut Dahl (1994: 157-163) menyebutkan beberapa alasan mengapa seseorang berperilaku tidak mau terlibat dalam politik, jika :

1. Orang mungkin kurang tertarik dalam politik, jika mereka memandang rendah terhadap segala manfaat yang diharapkan dan keterlibatan politik, dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dari aktivitas lainnya.

2. Orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan seseorang tersebut tidaklah menjadi persoalan.
3. Seseorang cenderung tidak terlibat dalam politik jika merasa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat merubah dengan jelas hasilnya.
4. Seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa hasilnya relatif memuaskan orang tersebut, sekalipun ia tidak berperan di dalamnya.

3. Tinjauan tentang Sikap Politik

Menurut Soewondo (Tamimi, 2004), sikap politik diartikan sebagai kesiagaan mental yang diorganisir lewat pengalaman yang mempunyai pengaruh tertentu kepada tanggapan seseorang terhadap orang lain, objek, dan situasi yang berhubungan dengan itu. Menurut Soewondo (Tamimi 2004:20) sikap mempunyai hubungan yang erat dengan nilai dalam arti bahwa nilai-nilai dapat digunakan sebagai suatu cara untuk mengeluarkan sejumlah sikap. Dengan sikap, seseorang dapat menyatukan perasaan setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, dan pola yang menentukan pandangan tentang dunia.

Menurut Plano (Khoirudin, 2004:95) sikap politik merupakan pertalian diantara berbagai keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang

untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan suatu cara-cara tertentu. Sikap politik tergantung dari persoalan-persoalan para pemimpin, gagasan-gagasan, lembaga-lembaga atau peristiwa-peristiwa politik. Walaupun sikap lebih abadi daripada pikiran atau suasana hati, namun sikap cenderung berubah sesuai dengan berlakunya waktu dan dengan berubahnya keadaan dan cenderung dipengaruhi oleh berbagai macam motif (karena sikap itu sifatnya insidental) tergantung dari kondisi atau peristiwa yang mendukung dan melatarbelakanginya.

Sikap politik elite partai banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan. Dimana pernyataan para elite tidak dapat dilihat semata-mata demi kepentingan partai, tetapi kita harus dapat melihat apa alasan dibalik sikap/pernyataan politik para elite partai. Dalam konflik internal Partai Golkar yang terjadi saat ini, dukungan yang diberikan oleh Heru Sambodo terhadap kubu Agung Laksono tidak dapat dilihat secara tersurat, tetapi harus dilihat apa alasan dibalik dukungan yang diberikan.

Dapat kita lihat, keberpihakan Heru Sambodo terhadap kubu Agung Laksono berbuah “kursi empuk” DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung. Dengan adanya “hadiah” tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap elite partai politik di DPD I Provinsi Lampung dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kepentingan pribadi, jabatan politik, imbalan, atau bahkan dapat berupa situasi untuk “mencari aman” atas konflik yang sedang terjadi.

Penulis melihat, dalam perpecahan pada internal Partai Golkar di DPD I Provinsi Lampung antara Alzier Dianis Thabrani dengan Heru Sambodo yang tidak lain adalah bapak dengan anak itu ada unsur “politik dua kaki”. Dimana perbedaan dukungan tersebut adalah bagian dari strategi politik untuk tetap berkuasa. Alzier yang berpihak pada kubu Aburizal Bakrie akan tetap berkuasa jika yang memenangkan konflik adalah Aburizal Bakrie. Dan jika yang menang adalah kubu Agung Laksono, kekuasaan DPD I Provinsi Lampung tetap berada pada keluarga Alzier yaitu Heru Sambodo sebagai anak dari Alzier.

Hal tersebut memang tidak terbuka, tetapi mudah sekali terbaca. Politik dua kaki ini adalah bagian dari strategi politik yang dimainkan oleh para elite partai karena ada kepentingan di dalamnya, yaitu kekuasaan. Pada penelitian ini, penulis mengkaji komponen dan sikap politik elite Partai Golkar terhadap konflik internal Partai Golkar di DPD I Provinsi Lampung dimana komponen sikap tersebut terdiri dari komponen kognitif (pengetahuan), komponen afektif (perasaan), dan komponen konatif (kecenderungan bertindak).

B. Tinjauan Tentang Elite

1. Definisi Elite

Menurut Pareto (Sitepu, 2012: 82) elite adalah kelompok orang yang mempunyai indeks kemampuan yang tinggi dalam aktivitas mereka,

apapun bentuknya akan tetapi dia mengkonstruksikan diri pada apa yang disebutnya “elite penguasa”.

Sirkulasi elite (Varma, 2007: 201) juga dikembangkan oleh Pareto. Ia mengemukakan berbagai jenis pergantian elite, yaitu pergantian:

- 1) Di antara kelompok-kelompok elite yang memerintah itu sendiri
- 2) Di antara elite dengan penduduk lainnya.
Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan:
 - a. Individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elite yang sudah ada
 - b. Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elite yang sudah ada.

Mengenai penyebab runtuhnya elite yang berkuasa, Pareto menjawab pertanyaan ini dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sifat psikologis berbagai kelompok elite yang berbeda. Dalam hubungan inilah Pareto mengembangkan konsep residu. Konsep ini didasarkan pada perbedaan antara tindakan logis dan non-logis dari individu-individu dalam kehidupan sosialnya.

Selain Pareto yang mengembangkan teorinya atas dasar keahliannya sebagai sosiolog dan psikolog, Mosca (Sitepu, 2012: 202) juga mengembangkan teori elite politik secara lebih jauh. Ia menegaskan bahwa hanya ada satu bentuk pemerintahan, yaitu oligarki. Mosca menolak dengan gigih klasifikasi pemerintahan ke dalam bentuk-bentuk Monarki, Demokrasi, dan Aristokrasi.

Menurut Mosca, selalu muncul dua kelas dalam masyarakat, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang pertama, yang biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Sementara kelas yang kedua yang jumlahnya lebih besar, lebih legal, terwakili dan keras serta menyuplai kebutuhan kelas yang pertama, paling tidak pada saat kemunculannya, dengan instrumen-instrumen yang penting bagi vitalitas organisme politik.

Mengacu pada definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa elite adalah kelompok orang yang memegang fungsi politik, memonopoli kekuasaan,

berjumlah sedikit, dan merupakan kelompok yang mampu memengaruhi kebijakan maupun situasi politik yang sedang berjalan.

2. Elite Partai Golkar

Menurut Mosca (Sitepu, 2012: 202) elite partai politik adalah sekelompok orang yang memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Dalam struktur kepengurusan Partai Golkar, yang termasuk kedalam elite partai politik yaitu terdiri dari tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, dusun/kampung.

Berdasarkan sumber (AD/ART Partai Golkar, di akses dari <http://partaigolkar.or.id/golkar/art/> pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.45 WIB) Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar Bab VII tentang struktur organisasi serta wewenang dan kewajiban pimpinan Pasal 17 yaitu:

1. Ketua
2. Ketua Harian (apabila diperlukan)
3. Wakil Ketua
4. Sekretaris
5. Wakil-wakil Sekretaris
6. Bendahara
7. Wakil-wakil Bendahara
8. Ketua-ketua Biro
9. DPD Provinsi terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian
10. Pengurus Pleno adalah seluruh pengurus DPD Provinsi

Struktur organisasi Partai Golkar terdiri atas tingkat pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti elite Partai Golkar pada jenjang kepengurusan daerah Provinsi, yaitu Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung (DPD I).

C. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Gelombang reformasi telah mengakibatkan munculnya bermacam-macam aspirasi, diantaranya terjadi pergerakan rakyat untuk menciptakan suasana yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada semacam luapan kegembiraan dengan tuntutan kebebasan politik yaitu pembentukan partai-partai baru di Indonesia. Untuk menuju demokratisasi, partai politik memainkan peranan penting dalam proses perwakilan dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan. Di era reformasi ini terdapat dua Undang - Undang Partai Politik yang telah disahkan oleh Negara, yaitu UU No.2 tahun 1999 dan UU No.31 tahun 2002. Perkembangan Undang-Undang Partai Politik tersebut mengikuti perkembangan demokratisasi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 (Safa'at, 2011: 1) tentang Partai Politik, hak membentuk Partai Politik diakui setelah dikekang selama Orde Baru. Muncul 141 partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM.

Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para ahli. Diantaranya ahli ilmu klasik kontemporer (Budiardjo, 2008: 404) yaitu :

Carl J. Freidrich mendefinisikan partai politik adalah sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta meteral.

Menurut Max Weber (Firmanzah, 2007: 66) partai politik didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik menurut Max Weber sangat berkembang pesat di abad ke-19 karena didukung oleh legitimasi legal-rasional.

Menurut Marijan (2010: 60) munculnya partai-partai politik di Indonesia tidak lepas dari adanya iklim kebebasan yang luas pada masyarakat pasca pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan demikian memberikan ruang kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik. Selain itu, lahirnya partai politik di Indonesia juga tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan, yang tidak saja dimaksudkan untuk memperoleh kebebasan yang lebih luas dari pemerintahan kolonial Belanda, juga menuntut adanya kemerdekaan. Hal ini bisa kita lihat dengan lahirnya partai-partai sebelum kemerdekaan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan dan orientasi-orientasi yang sama untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan politik, dengan kekuasaan tersebut memberikan manfaat terhadap partai, pemimpin dan anggotanya yang bersifat ideal dan material.

2. Fungsi Partai Politik

Menurut Safa'at (2011: 66-70) sesuai dengan landasan teori partai politik dan asal-usul serta perkembangannya, terdapat beberapa fungsi partai politik yang dikemukakan oleh para ahli. Fungsi-fungsi tersebut pada umumnya adalah: (1) sarana komunikasi politik; (2) sarana sosialisasi politik; (3) rekrutmen politik; (4) Pengelola konflik.

Hampir sama dengan fungsi-fungsi tersebut Almond dan Powell (Safaat, 2011: 66) mengemukakan tiga fungsi partai politik, yaitu rekrutmen politik (*political recruitment*), sosialisasi politik (*political socialization*), dan artikulasi dan agregasi kepentingan (*interest articulation and aggregation*). Sedangkan Friedrich mengemukakan fungsi partai politik sebagai berikut: (1) *selecting future leader*; (2) *maintaining contact between the government, including the opposition*; (3) *representing the various groupings in the community, and*; (4) *integrating as many of the groups as possible*.

a. Fungsi Komunikasi dan Sosialisasi Politik

Partai politik berkomunikasi dengan rakyat dalam bentuk menerima aspirasi dan menyampaikan program-program politik. Partai politik menerima aspirasi dan mengelolanya menjadi pendapat umum dan dituangkan dalam bentuk program serta diperjuangkan menjadi keputusan pemerintah. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi "*broker of idea*" dan bagi partai yang sedang memerintah berfungsi sebagai instrumen kebijakan (*parties of policy instrument*).

Melalui fungsi itu, partai politik menerjemahkan dan menggabungkan pandangan-pandangan individual dan kelompok-kelompok tertentu (*interest aggregation*) menjadi program (*interest articulation*) yang akan dilaksanakan pemerintah dan menjadi dasar legislasi.

b. Fungsi Rekrutmen Politik

Melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat. Selain itu kepala pemerintah baik pusat maupun daerah juga dipilih dengan rekrutmen dan seleksi melalui partai politik, baik yang berasal dari partai itu sendiri maupun yang berasal dari pihak ketiga. Salah satu tujuan sistem kepartaian adalah untuk mengontrol pemerintahan. HAMpir setiap partai politik memiliki tujuan menguasai dan memelihara kontrolnya atas pemerintahan. Fungsi ini membuat partai politik menjalankan peran yang efektif.

c. Fungsi Pengelola Konflik

Dalam sistem konstitusi berdasarkan *separation of power*, fungsi partai politik adalah memelihara dan mengelola konflik antara legislatif dan eksekutif. Salah satu konsekuensi demokrasi adalah perluasan partisipasi politik. Partisipasi tidak hanya dalam bentuk pemilihan dan aspirasi kebijakan, tetapi juga membuka peluang terhadap semua warga negara untuk memerintah dalam jabatan publik.

Peluang itu membuka kemungkinan terjadinya pertentangan atau konflik. Konflik hanya dapat dikelola dengan baik jika terdapat aturan main dan pelembagaan kelompok-kelompok sosial dalam organisasi politik. Tanpa adanya pengorganisasian, partisipasi akan berubah menjadi gerakan massal yang merusak sehingga perubahan politik cenderung terjadi melalui revolusi atau kudeta. Oleh karena itu, partai politik juga menjalankan fungsi sebagai pengelola konflik.

Beberapa fungsi yang telah disebutkan tidak selalu dapat diperankan dalam praktik kehidupan politik. Dapat terjadi suatu partai politik tidak memberikan informasi yang benar dan bermanfaat, sebaliknya informasi yang diberikan oleh partai politik berpotensi menimbulkan perpecahan. Suatu partai juga mungkin juga tidak menjadikan kepentingan nasional sebagai orientasi utama, tetapi lebih memperhatikan kepentingan golongan.

Beberapa teori tentang Partai Politik yang telah digunakan untuk mengkritik kiprah Partai Politik adalah teori oligarki. Teori ini menunjukkan kiprah partai politik lebih mengutamakan kepentingan elite Partai Politik, bukan konstituen/pemilih, apalagi rakyat kebanyakan. Reformasi dan demokratisasi di Indonesia gagal menghentikan kecenderungan oligarki. Kecenderungan oligarki partai terlihat jelas di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie dimana kaderisasi seharusnya bersifat terbuka dan berbasis pada kualifikasi yang akuntabel dan profesional.

D. Tinjauan Tentang Konflik

1. Hakekat Konflik

Konflik dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar terjadi. Karena banyaknya anggota organisasi menjadikan perbedaan pendapat sering terjadi antar anggota maupun dengan pemimpinnya. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, jika tidak diselesaikan dengan cara yang baik akan menimbulkan konflik yang dapat berdampak buruk bagi kelangsungan organisasi.

Menurut Ardana (2009:111) konflik adalah suatu gejala yang sudah merupakan suratan tangan dalam garis kehidupan organisasi ia merupakan kekuatan besar yang dapat membawa organisasi ke arah yang positif, tetapi terkadang dapat memecah belah dan bahkan mampu menghancurkan. Salah satu realitas, kehadiran konflik tidak perlu dipandang sebagai suatu persoalan. Akan lebih berguna apabila dipandang sebagai suatu tantangan yang harus dijawab secara tepat. Mempermasalahkan sesuatu yang eksistensinya tidak bisa dihindari adalah perbuatan yang mubazir.

Lebih bijaksana bila hal itu dibedah secara seksama serta direspons secara positif. Artinya konflik adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari dan yang dibutuhkan adalah bagaimana mengelolanya secara baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dampak konflik pada internal Partai Golkar tergantung pada cara pandang anggota terhadap konflik dan cara menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Jika anggota Partai Golkar dapat memandang konflik sebagai suatu tantangan seperti yang dijelaskan di atas, maka Partai Golkar akan menjadi lebih berkembang pasca konflik.

2. Definisi Konflik

Menurut Wahjono (2010:161) konflik merupakan suatu proses apabila satu pihak mulai merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau sesuatu yang menjadi perhatian pihak pertama. Definisi tersebut merupakan pengertian yang luas yang menjelaskan bahwa suatu titik pada setiap kegiatan yang tengah berlangsung bila suatu interaksi “bersilangan” dapat menjadi suatu konflik antar pihak.

Definisi sebagai mana dikemukakan tersebut cukup fleksibel yang mencakup semua rentang tingkat konflik, dari tindakan yang terbuka dan penuh kekerasan sampai ke bentuk halus dari ketidaksepakatan.

Menurut Robbins (Ardana, 2009:112) konflik adalah suatu proses dengan mana usaha yang dilakukan oleh A untuk mengimbangi usaha - usaha B dengan cara merintanginya yang menyebabkan B frustrasi dalam mencapai tujuan atau meningkatkan keinginannya.

Menurut AL Banesc (Ardana, 2009:112) konflik merupakan kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak - pihak merasakan adanya ketidak sesuaian tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan.

Menurut Schmidt dan Kochan (Ardana, 2009:112) konflik merupakan suatu perselisihan atau perjuangan di antara dua pihak yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan secara terbuka dan/atau mengganggu dengan sengaja pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya. Gangguan yang dilakukan dapat meliputi usaha – usaha yang aktif atau penolakan pasif.

Mengacu pada definisi tersebut, penulis menggunakan teori konflik untuk mengkaji lebih dalam. Dimana teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.

3. Cara Pandang Terhadap Konflik

Menurut Ardana (2009: 112) ada tiga cara pandang terhadap konflik yaitu:

- 1) Pandangan tradisional, semua konflik berbahaya maka harus dihindari, dengan cara apapun. Disini muncul kecenderungan untuk menekannya dan menyembunyikan dari permukaan dengan harapan lenyap dengan sendirinya.
- 2) Pandangan hubungan kemanusiaan, bahwa konflik adalah sesuatu yang alami dan merupakan hal yang tak dapat dikesampingkan dalam kelompok, karenanya konflik tidak dapat dihindari dan berpotensi positif dalam menentukan kinerja kelompok.
- 3) Pandangan interaksionis, bahwa konflik tidak saja dapat menjadi kekuatan positif, bahkan mutlak diperlukan.

Dari ketiga padangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa konflik merupakan sesuatu yang alami dan tidak dapat dikesampingkan dalam

kelompok/organisasi, cara pandang anggota kelompok/organisasi juga memengaruhi dampak pasca konflik.

4. Sumber Konflik

Menurut Islami (Ardana, 2009:113) secara rinci mengemukakan sumber konflik yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Manusia yang agresif dan menggunakan organisasi sebagai tempat untuk penyalur konflik.
- 2) Persaingan karena adanya sumber-sumber yang terbatas seperti modal, material, tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3) Adanya kepentingan, hal ini dapat terjadi bila dua unit organisasi atau lebih memiliki tujuan yang berbeda-beda.
- 4) Perbedaan fungsi/peranan, karena adanya peranan yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok berbeda dan secara intern berbeda satu sama lain.
- 5) Ketidakkompakan, terutama dalam mencapai tujuan organisasi.
- 6) Adanya harapan peranan yang gagal dilaksanakan.
- 7) Ketidaktentuan tugas dan tanggung jawab.
- 8) Iklim organisasi yang tidak sehat.
- 9) Ambisi yang berlebihan.
- 10) Sifat manusia yang cenderung untuk berbuat rakus.

Mengacu pada sumber konflik yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sumber konflik khususnya konflik dalam Partai Politik bersumber pada anggota Partai Politik yang cenderung menggunakan organisasi sebagai alat untuk memperkaya diri dan mengesampingkan kepentingan masyarakat.

5. Konflik Politik

Menurut Gatara (2011:183) konflik politik adalah percekocokan, pertentangan, perselisihan dan ketegangan. Sedangkan menurut

Soekanto (1989:90) konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antarpartai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing.

Gatara (2011:181) perspektif konflik menyatakan bahwa masyarakat selalu berada pada ruang konflik yang terjadi secara terus menerus, baik pada tingkat dan skala kecil maupun skala besar dalam setiap masyarakat. Pandangan perspektif konflik ini dilandaskan pada sebuah asumsi utama yakni:

1. Masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan dominan. Kekuatan dominan ini dapat berupa pemodal (orang yang memiliki kekuasaan di bidang ekonomi) atau negara (penguasa).
2. Masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan berbeda dan saling bertentangan. Karena itu, masyarakat selalu dalam keadaan konflik.

Pertentangan dan perbedaan menjadi kunci dalam mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan konflik politik. Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa konflik politik adalah “gejala pertentangan dalam masyarakat yang berkaitan dengan mata rantai kekuasaan dan negara”.

6. Bentuk dan Penyebab Konflik Politik

Fisher, dkk (Gatara, 2011: 183-185) menjelaskan tentang berbagai teori penyebab terjadinya konflik.

- 1) Teori hubungan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya polarisasi yang terus terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda.
- 2) Teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak yang mengalami konflik.
- 3) Teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi bisa disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang bisa disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau sengaja dihambat oleh pihak lain. Kebutuhan dasar manusia biasanya menyangkut tiga hal, yakni kebutuhan fisik, mental, dan sosial.
- 4) Teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi akibat adanya identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan.
- 5) Teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan adanya ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.
- 6) Teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi.

Dari teori-teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyebab konflik yang terjadi pada internal Partai Golkar adalah adanya posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak yang mengalami konflik.

7. Resolusi Konflik

Davies (Gatara, 2011:185) membedakan tiga pendekatan dalam pengelolaan konflik.

1. Pendekatan berdasarkan kekuasaan (*power-based approach*), menggunakan kekuatan kekuasaan untuk memecahkan semua jenis konflik. Seandainya sifat pemerintahan adalah otoriter (*authorian*), pemecahan konflik tampak pada tingkat permukaan (*surface*), tidak sampai pada tingkat akar penyebab konflik.

2. Pendekatan berdasarkan hukum (*right-based approach*), pendekatan ini biasanya lebih menggunakan hukum, adat, norma dan sistem hukum sebagai alat penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, struktur politik di Indonesia memungkinkan untuk melakukan subordinasi penegak hukum pada kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan.
3. Pendekatan berdasarkan kepentingan (*interest-based approach*). Kepentingan ini berupaya untuk membangun pemecahan yang mencerminkan nilai, kebutuhan dan kepentingan yang terpendam dalam hati pihak yang bertentangan.

Dari berbagai pendekatan pengelolaan konflik di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Partai Golkar adalah pendekatan berdasarkan hukum (*right-based approach*), dimana pengelolaan konflik partai lebih menggunakan hukum, norma dan sistem hukum sebagai alat penyelesaian konflik yang terjadi.

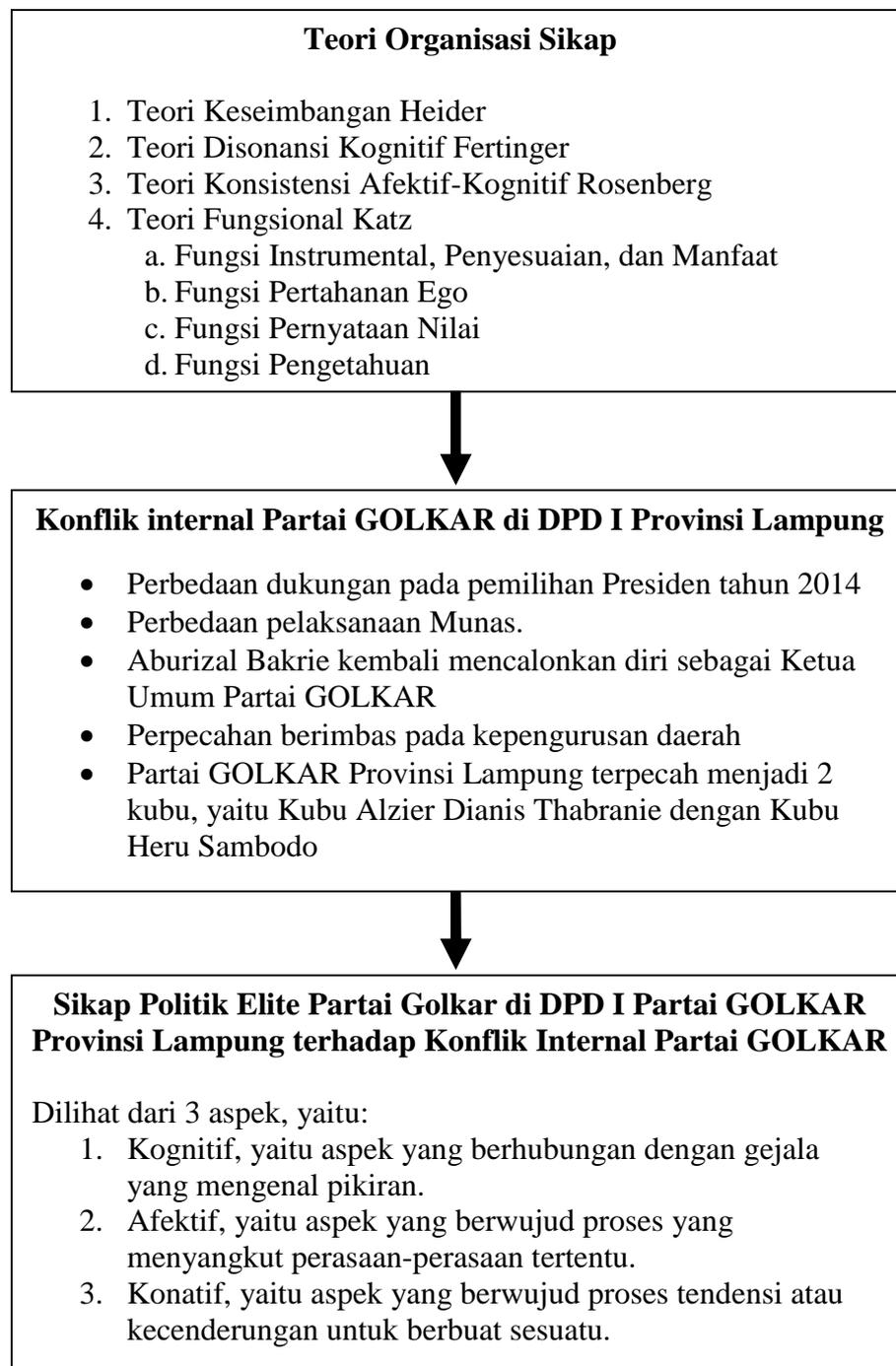
E. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sikap politik elite Partai Golkar yang ada di DPD I Provinsi Lampung terhadap konflik internal yang terjadi di pusat dan berimbas pada kepengurusan di daerah. Penelitian ini akan membahas sikap politik elite Partai Golkar yang ada di DPD I Provinsi Lampung dengan menggunakan teori sikap yaitu dengan mengukur sikap para elite Partai Golkar di DPD I Lampung dengan 3 aspek, yaitu:

1. Aspek kognitif (pengetahuan) yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran, yang berwujud pengolahan, pengalaman, dan

keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu.

2. Aspek afektif (perasaan) yaitu berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati dan sebagainya yang ditujukan terhadap objek-objek tertentu.
3. Aspek konatif (kecenderungan bertindak) yaitu aspek yang berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu kepada objek misalnya, kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.



Gambar 1. Kerangka Pikir